

## General Overview

Entri FHNRW 1-15 Juni adalah 18 entri berita. Berita kesehatan terdiri dari 5 berita, diantaranya mengenai warga Sumba Timur mengeluhkan penyakit kulit akibat hujan debu vulkanik Gunung Sangeang Api dan Pintu Polindes di Dusun Gere, Desa Koting A, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka yang selalu di tutup,. Berita pangan, terdiri dari 3 berita diantaranya tentang Lima desa di Kec. Noebeba TTS yang gagal panen, dan Gizi buruk di NTT yang menempati urutan tertinggi di NTT. Berita risiko terdiri dari 3 berita, diantaranya tentang Warga Minta PT Karya Buana Hentikan Galian C di Kec. Fatuleu, Kab. Kupang dan Bidan Ningsi takut Melintas karena air laut masuk ke badan jalan di trans utara lintas Flores. Berita tentang air terdiri dari 7 berita, diantaranya mengenai Dua sumber air yang jadi rebutan di Manggarai Timur dan Dana Sebesar Rp. 4,5 M untuk penambahan Debit Air di Manggarai Timur

Isu Terseleksi	16-31 Mei	1-15 Juni
Kesehatan (Health)	10	5
Pangan & Gizi (Food & Nutrition)	2	3
Risiko (Risk)	5	3
Air (Water)	7	7
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>18</b>

IRGSC NTT Research focus adalah publikasi regular yang berisikan ringkasan penelitian tentang NTT yang mutakhir yang dikombinasikan dengan berita dari tiga media harian utama di NTT yakni Pos Kupang, Timor Express dan Victory News. Fokus dari NTT Research Focus adalah pada isu kesehatan, pangan, nutrisi, risiko, dan air. Terkait rangkuman berita di bawah ini, diharapkan agar pembaca melakukan validasi dari kliping berita yang dimaksudkan [Lihat juga keterangan penerbitan di halaman 16].

## Table of Contents

KESEHATAN .....	3
1. Warga Keluhkan Penyakit Kulit .....	3
2. Pintu Polindes Tutup Terus .....	3
3. Perawat Sukarela Diberhentikan .....	4
4. Napi Belum Jadi Anggota BPJS .....	4
5. Peserta JKN Keluhkan Layanan Kesehatan .....	5

PANGAN & NUTRISI.....	6
1. Lima Desa Gagal Panen.....	6
2. Gizi Buruk di NTT Urutan Tertinggi .....	6
3. RSUD: Karlin Bukan Korban Malpraktek .....	7
RISIKO .....	8
1. Warga Minta PT Karya Buana Hentikan Galian C .....	8
2. Jalan Provinsi Seperti Arena Balap Motor .....	8
3. Bidan Ningsi Takut Melintas. Air Laut Masuk ke Badan Jalan di Trans Utara Lintas Flores.....	9
AIR .....	10
1. Dua Sumber Air Jadi Rebutan .....	10
2. Rp 4,5 M untuk Penambahan Debit Air .....	11
3. Baru 30 Persen Warga Nikmati Air PDAM .....	11
4. Warga Liliba Keluhkan Kinerja PDAM .....	12
5. Embung Ratusan Juta Mubazir .....	13
6. Pipa Air 2.000 Meter Hancur .....	13
7. Warga Leowalu Konsumsi Air Kali.....	14

### **Daftar Singkatan**

BLUD-SPAM	: Badan Layanan Umum Daerah-Sistem Penyedia Air Minum
BPJS	: Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
M	: Miliar
NAPI	: Nara Pidana
NTT	: Nusa Tenggara Timur
POLINDES	: Pos Perlindungan Desa
PT	: Perusahaan Terbatas
RSUD	: RUmah Sakit Umum Daerah
WVI	: Wahana Vision Indonesia

## KESEHATAN

### 1. Warga Keluhkan Penyakit Kulit

Victory News: Rabu, 4 Juni 2014 (halaman 13)

Walau akibat hujan debu vulkanik Gunung Sangeang Api sudah tidak lagi mengganggu aktivitas masyarakat Kabupaten Sumba Timur, Selasa (3/6). Namun beberapa warga mulai merasakan dampak debu vulkanik. Keluhan mereka sama yakni mengalami penyakit gatal-gatal pada bagian tubuh yang diduga terkena debu vulkanik. Hendrik salah seorang warga Prailiu, Kecamatan Kambera yang dijumpai VN di Pasar Matawai mengatakan pasca hujan debu vulkanik Gunung Sangeang Api, Jumat-Sabtu (30-31/5), dirinya sempat keluar rumah untuk membeli kebutuhan rumah tangga, dan pada keesokan hari, Minggu (1/6), ia merasakan gatal-gatal di bagian lehernya. Padahal sebelum hujan debu vulkanik, dirinya tidak pernah mengalami penyakit gatal pada kulit. "Saya takut menyebar ke bagian tubuh yang lain," kata Hendrik sambil menunjukkan lehernya yang agak lebam akibat digaruk. Hal senada juga dialami Nggau Ndulla Awang, warga Laipandak, Kecamatan Wulla Waijelu yang ditemui di Waingapu, siang kemarin. Menurutnya, ia datang ke Kota Waingapu untuk berobat gatal-gatal pada kulit kedua tangannya yang dialami sejak Sabtu (31/5) lalu. Kepala Dinas Kesehatan Sumba Timur dr. Chrisnawan Tri Haryantana ketika dikonfirmasi via ponselnya mengatakan, dampak abu vulkanik yang langsung seperti gatal-gatal pada kulit kemungkinan bisa terjadi. Namun dampak umum yang berhubungan langsung dengan abu vulkanik bisa terjadi iritasi pada mata dan gangguan pada pernafasan. Ia mengimbau kepada masyarakat Sumba Timur selalu waspada menggunakan masker penutup hidung, meskipun cuaca di Sumba Timur sudah terlihat cerah. Sebab saat ini angin cukup kencang sehingga debu vulkanik itu dapat menimbulkan masalah kesehatan.

### 2. Pintu Polindes Tutup Terus

Pos Kupang: Rabu, 4 Juni 2014 (halaman 18)

Polindes di Dusun Gere, Desa Koting A, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, yang dibangun megah di tengah pemukiman warga, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pintu polindes selalu tertutup karena tidak ada bidan tetap. Pondok bersalin desa (Polindes) adalah salah satu tempat persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak. pelayanan di polindes biasanya dilakukan oleh bidan. Menurut keterangan warga sekitar polindes, bangunan itu berdiri sejak sepuluh tahun lalu. Awalnya ada bidan tetap yang bertugas selama enam tahun, namun kemudian bidan tersebut pindah ke RSUD Maumere. Sejak kepindahan itu, tidak ada lagi bidan tetap di Polindes Gere. Sony, warga dusun Gere, saat ditemui pos kupang di kediamannya mengatakan, keberadaan polindes di tengah warga sangat dibutuhkan mengingat jangkauan ke puskesmas atau sarana kesehatan yang lain

terbilang susah. “Sudah tiga atau empat tahun di Dusun Gere ini tidak ada bidan tetap. Yang ada hanya bidan sementara yang keberadaannya di polindes ini kadang ada, kadang tidak. Lebih banyak pintu polindes tertutup rapi. Padahal warga di sini sangat membutuhkan polindes ini. Karena tutup terus, maka ibu hami dan pemeriksaan kesehatan bayi dibawa ke Puskesmas Koting,” jelas Sony. Warga Dusun Gere meminta pemerintah memperhatikan hal ini. Mereka sangat membutuhkan bidan tetap yang bertugas di polindes mereka agar tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak dapat difungsikan.

### **3. Perawat Sukarela Diberhentikan**

Timor Express: Selasa, 3 Juni 2014 (halaman 11)

Untuk mencegah risiko medis yang timbul, sejumlah perawat yang bekerja sukarela di lingkungan RSUD Prof. WZ Johannes Kupang, terpaksa diberhentikan terhitung 1 Juni 2014. Pasalnya, manajemen rumah sakit tersebut tidak mau bertanggung jawab atas risiko medis yang dilakukan perawat, yang bekerja sebagai tenaga sukarela. Berdasarkan hasil konsultasi, Direktur RSUD Prof. WZ Johannes Kupang, Alphonsius Anapaku memerintahkan untuk diberhentikan tenaga perawat sukarela. Demikian penjelasan Kepala Perawat RSUD Prof. WZ Johannes Kupang, Yosias Here saat ditemui Timor Express, Rabu (28/5). Menurutnya, selama ini banyak perawat yang bekerja sebagai tenaga sukarela di RSUD ini. Selama bekerja, perawat yang bersangkutan tidak menuntut hak, karena hanya mencari pengalaman kerja. Setelah mendapat pengalaman kerja, perawat yang bersangkutan mulai satu per satu menghilang, sambil meminta bukti pengalaman kerja dari rumah sakit. Bagi perawat yang masih bertahan, ujaranya, terpaksa harus diberhentikan karena ditakutkan timbul resiko medis, atau praktek yang dilakukan perawat tenaga sukarela. Apalagi hanyalah tenaga sukarela, yang tidak memiliki ikatan resmi. Meskipun demikian, ada sebagian perawat yang akan dipanggil kembali, sambil menunggu persetujuan DPRD NTT, terkait alokasi anggaran untuk mengakomodir perawat honorer di lingkungan rumah sakit.

### **4. Napi Belum Jadi Anggota BPJS**

Pos Kupang: Jumat, 6 Juni 2014 (halaman 15)

Para napi dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas III Kupang, hingga saat ini belum menjadi anggota BPJS. Salah satu kendala untuk mengurusnya adalah para napi dan tahanan ini tidak memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (KTP). Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas III Kupang, Alfrida, SH, MH, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (5/6). Ia mengatakan, untuk pasien yang harus dirujuk di rumah sakit, selama ini masih tertolong dengan keberadaan Jamkesmas, tetapi saat ini sudah tidak bisa digunakan lagi. “Kami sudah berbicara dengan Wakil Walikota Kupang untuk membantu kami dalam memfasilitasi

para napi dan tahanan agar segera menjadi anggota BPJS. Jika mereka sakit dan dirujuk di rumah sakit maka harus dikenakan biaya sebagai pasien umum karena belum menjadi anggota BPJS,” kata Alfrida. Terkait fasilitas kesehatan di LP wanita, Alfrida yang didampingi stafnya Bertha Bailaen, mengatakan, mereka kekurangan tempat tidur, alat pemeriksaan kesehatan seperti stetoskop dan obat-obatan yang kurang memadai. “Tahun ini kami tidak mendapat anggaran kesehatan sehingga kesulitan dalam melakukan pengadaan alat kesehatan,” ujarnya. Saat ini, kata Alfrida, obat-obatan yang ada di dalam klinik merupakan bantuan dari Dinas Kesehatan Kota Kupang.

## 5. Peserta JKN Keluhkan Layanan Kesehatan

Victory News: Kamis, 5 Juni 2014 (halaman 15)

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menilai program ini hanya namanya saja yang nasional namun ruang lingkungannya lokal. Pasalnya, pemegang kartu JKN dibatasi banya berobat di fasilitas kesehatan yang sudah dijamin di wilayahnya. “Sebagai peserta, saya usulkan jangan pakai nama Jaminan Kesehatan Nasional lagi. Karena berobat di Puskesmas tetangga saja kepesertaan kita tidak berlaku lagi,” kata Alex Yavet Mboli, warga Sikumana kepada VN, Rabu (4/6). Dia mengaku, sebagai warga Sikumana, dia ditolak ketika berobat di Puskesmas Maulafa dengan menggunakan kartu JKN. Alasannya, dalam kepesertaan JKN, dia dan keluarganya hanya dijamin untuk berobat di Puskesmas Sikumana. “Masih di puskesmas lain dalam satu kecamatan saja kita ditolak. Apalagi ketika sakit kita berada di kabupaten atau provinsi lain,” ketusnya. Mboli berharap program yang baru berlaku lima bulan ini dievaluasi lagi. Menurutnya, program ini berbeda dengan Jamkesmas sebelumnya sehingga mestinya harus lebih baik. “Dulu Jamkesmas tidak ada iuran, sekarang ada iurannya. Tentu sistemnya harus lebih baik,” ujarnya. Mboli mengaku baru mengetahui kepesertaan JKN ini hanya terbatas pada puskesmas yang dijamin ketika mengadakan masalah ini ke kantor BPJS Kesehatan Cabang Kupang. Berdasarkan penjelasan petugas BPJS Kesehatan, katanya, untuk mengurus pindah ke puskesmas lain membutuhkan waktu tiga bulan baru bisa mendapatkan kartu lagi. Kepala BPJS Cabang Kupang, Fransiskus Pareira yang dikonfirmasi sebelumnya menjelaskan, kepesertaan JKN dibagi per wilayah sehingga apabila ada peserta JKN yang berobat ke puskesmas lain, yang bersangkutan harus melapor ke BPJS untuk dipindahkan ke puskesmas tersebut. Sementara peserta JKN yang berobat ke rumah sakit, katanya harus membawa rujukan dari puskesmas yang dijamin. Hal ini berbeda dengan kondisi darurat dimana pasien harus diselamatkan terlebih dahulu. “Kalau kondisi darurat, rujukan bisa diatur kemudian. Prinsipnya ditangani,” katanya.

## PANGAN & NUTRISI

### 1. Lima Desa Gagal Panen

Timor Express: Kamis, 12 Juni 2014 (halaman 13)

Akibat curah hujan yang tidak merata pada musim hujan tahun 2013, mengakibatkan masyarakat empat desa di Kecamatan Noebeba yakni Desa Enonabuasa, Faut Tutnana, Oebaki, Naipdan Teas mengalami gagal panen. Akibatnya, saat ini masyarakat kekurangan stok pangan. Camat Noebeba, Simeon Benu mengemukakan hal itu ketika dikonfirmasi Timor Express di Soe, Selasa (10/6). Simeon mengatakan, persoalan gagal panen yang dialami masyarakat beberapa waktu lalu, pihaknya sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati TTS, Paulus VR Mella untuk meminta bantuan dari Pemkab TTS. Pasalnya, saat ini masyarakat mencukupi kebutuhan makan dengan cara menjual ternak yang mereka miliki. "Saya sudah laporkan kondisi yang terjadi. Tapi Pak Bupati bilang tunggu raskin tahap II baru bantu masyarakat. selain bantu masyarakat melalui raskin, Pemkab juga akan buka pasar murah," ungkap Simeon. Masyarakat yang mengalami gagal panen tahun 2013, akibat curah hujan rendah sehingga ketika masyarakat menanam padi atau jagung tidak bisa tumbuh. Masyarakat justru menanam hingga dua kali, tetapi tanaman yang ditanam masyarakat mati terpanggang terik matahari. "Ada jagung yang tumbuh 10 sampai 30 centi mati kembali," paparnya. Simeon mengatakan, akibat curah hujan yang rendah mengakibatkan embung yang dibangun tahun 2013 di Desa Oebaki tidak berfungsi sesuai harapan. Karena itu, embung yang dipersoalkan oleh masyarakat bahwa mubazir, sesungguhnya tidak benar, karena curah hujan sangat rendah sehingga tidak bisa mengairi embung yang dibangun. "Kalau curah hujan normal, pasti embung berfungsi," kata Simeon. Terpisah, Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum (PU) TTS, Jek Benu mengatakan, pihaknya sudah melakukan perapian terhadap embung yang dipersoalkan masyarakat. Pasalnya, saat ini masih dalam masa pemeliharaan, sehingga kontraktor memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan.

### 2. Gizi Buruk di NTT Urutan Tertinggi

Victory News: Kamis 12 Juni 2014 (halaman 15)

Penderita gizi buruk di NTT menempati urutan tertinggi di Indonesia dengan persentase 58,4%. Meski angka gizi buruk mengalami penurunan, tidak berarti NTT bebas dari masalah gizi buruk. Hal ini terungkap dari kegiatan desiminasi hasil penelitian tentang Kebijakan Gizi Nasional yang diselenggarakan Wahana Vision Indonesia (WVI) bekerjasama dengan Bappeda NTT di Palapa Resto and Caffe Kupang, Selasa (10/6). Peneliti WVI Lindawati Wibowo, mengatakan, penanganan

masalah gizi di NTT belum tuntas karena masing-masing stakeholder, pemangku kepentingan, dan pemuat kebijakan mempunyai cara pandang berbeda terhadap masalah gizi. Selain itu, informasi tentang konsekuensi gizi pada anak masih terlalu minim sehingga masih banyak yang belum memberikan perhatian terhadap masalah ini. Menurut Lindawati, kecukupan makanan tidak sama dengan kecukupan gizi. Banyak pangan lokal yang punya kandungan gizi namun tidak banyak orang yang bisa mengelolanya dengan baik. Domi Mere dari Bappeda NTT mengatakan, masalah gizi tidak bisa dipecahkan dari aspek kesehatan saja, namun harus dilihat dari aspek ketersediaan pangan, distribusi dan konsumsi. “Kita punya Pergub Nomor 6 tahun 2012 yang mengatur rencana aksi percepatan pangan dan gizi yang bisa dipakai untuk penanganan masalah gizi,” kata Domi. Mantan Sekda Ende ini menambahkan, perhatian terhadap gizi bagi ibu dan bayi tidak hanya pada saat mengandung hingga melahirkan namun setelah lahir hingga anak berusia lima tahun. Sementara itu, Mindo Sinaga dari Dinas Kesehatan NTT mengatakan, untuk mengatasi masalah gizi kedepan, perlu ada tenaga penyuluh gizi di setiap daerah. Karena itu, pemerintah kabupaten atau kota diharapkan bisa merekrut tenaga penyuluh gizi untuk ditempatkan di desa-desa. Asteria Aritonang dari WVI mengemukakan, hasil riset kesehatan daerah 2010 menunjukkan bahwa NTT menempati posisi tertinggi dalam masalah gizi buruk kronis. Menurutnya, gizi buruk di NTT pada tahun 2012 sebanyak 3.791 kasus. Meskipun trennya menurun, gizi buruk masih tetap menjadi masalah serius yang harus ditangani. Menurutnya, untuk mengubah status gizi anak dibutuhkan penyebarluasan informasi yang tepat disertai pemberian makanan bergizi.

### **3. RSUD: Karlin Bukan Korban Malpraktek**

Victory News: Kamis 12 Juni 2014 (halaman 15)

Manajemen RSUD WZ Johannes kembali menegaskan bahwa membusuknya kaki kiri Karlin Mboeik bukan akibat malpraktek pasalnya penanganan pasien sudah dilakukan sesuai dengan standar medis. Penegasan ini disampaikan Wadir pelayanan RSUD Prof. WZ Johannes Kupang, Mina Sukri di ruang kerjanya, Rabu (11/6). Dia menyebutkan Karlin ditangani oleh tenaga medis dan dokter yang berpengalaman serta memiliki legalitas. “Kami sudah rapat dengan semua dokter yang terlibat, dan tidak kita temukan hal-hal yang mengarah ke malpraktek. Pasien datang kita layani dengan baik selama tiga kali masuk rumah sakit sejak Januari,” kata Mina. Dia juga menegaskan bahwa dalam memberikan pelayanan, pihaknya tidak pernah membedakan pasien. Mina mengaku pihaknya sudah menjelaskan kepada pihak keluarga terkait, penyakit yang diderita Karlin. Menurut dia, Karlin mengalami gangguan di kepala dan dirawat sejak Januari. “Saya kira kalau gangguan di kepala itu dapat menyebabkan banyak hal,” ujarnya tanpa merincikan hal yang menyebabkan gangguan di kepala Karlin. Terkait tuntutan keluarga agar manajemen RSUD Prof. WZ

Johannes agar menjelaskan penyebab membusuknya kaki kiri Karlin, dia menegaskan pihaknya tidak akan memberi penjelasan kepada media karena menyangkut hal teknis. “Semuanya sudah dijelaskan kepada keluarga pasien. Hal-hal teknis tidak bisa dijelaskan di sini karena sesuai etika kedokteran, dan sudah dijelaskan ke keluarga. Forum ini tidak membahas teknis dan cairan segala macam, tidak kita jelaskan di sini,” tambahnya.

## RISIKO

### 1. Warga Minta PT Karya Buana Hentikan Galian C

Timor Express: Rabu, 4 Juni 2014 (halaman 13)

Aktivitas penambangan galian C yang berlebihan oleh PT Karya Buana di lokasi Teun-Fatukuas Desa Camplong 2 Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang telah mengancam areal persawahan milik warga seluas 5 hektare lebih. Dikhawatirkan bila tidak dihentikan, areal sawah dan perumahan yang hanya berjarak sekira 50 meter dari lokasi penggalian terancam longsor saat musim hujan. Permintaan ini disampaikan pemilik sawah, Sepus Sanam dan Viktor Taeko kepada Timor Express, Senin (26/5). “Kami minta supaya dihentikan. Mereka sudah gali pakai alat berat, sudah masuk sampai kami punya sawah,” kata Serpus. Ia mengaku sudah secara langsung meminta kepada pihak perusahaan agar menghentikan aktivitas galian. Sayangnya, permintaan tersebut tidak diindahkan dan pihak perusahaan masih melakukan aktivitas sampai saat ini. “Saya sudah lapor di Kepala Desa dan Bapak Desa sarankan supaya bersurat saja. Karena itu saya sudah bersurat minta dihentikan tapi tetap tidak digubris,” sesal Serpus. Ia mengaku, surat tertanggal 12 Mei 2014 dikirim kepada Bupati, dewan, dinas pertambangan, dinas pekerjaan umum dan camat. “Saya tidak tahu lagi harus melapor ke siapa. Tapi kalau sampai batas waktu pasti kita akan turun demo,” kata Serpus. Lokasi penambangan galian C kata dia, awalnya ada di sekitar kali Teun-Fatukuas, tapi kini sudah masuk areal persawahan. Selain itu, lokasi tambang juga dekat dengan perumahan dan kuburan leluhur. “Kalau tetap tidak ditanggapi pasti kami akan turun demo. Kami juga bisa main paksa kalau tetap tidak digubris. Itu lahan kami jadi harus kami selamatkan,” katanya.

### 2. Jalan Provinsi Seperti Arena Balap Motor

Pos Kupang: Rabu, 4 Juni 2014 (halaman 22)

Kondisi ruas jalan provinsi dari pertigaan Mbata, Desa Ranambata sampai di Wukir, Ibukota Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), sangat memprihatinkan. Kondisinya seperti arena balap motor. Pantauan Pos Kupang, Minggu (1/6) siang, panjang jalan yang rusak parah sekitar 30 kilometer. Di ruas jalan yang rusak itu tak sedikitpun terlihat bekas aspal. Seluruh badan jalan hanya terlihat



tanah berlumpur dan bebatuan. Di badan jalan hanya terlihat bekas roda kendaraan baik roda empat maupun roda dua. Kendaraan roda empat yang mengangkut penumpang oleng, ke kiri dan ke kanan ketika melewati ruas jalan tersebut. Di dalam bak setiap kendaraan roda empat yang melintasi ruas jalan tersebut tersedia dedak padi untuk mengantisipasi jika roda kendaraan tertanam dalam lumpur. “Jalan tersebut sudah berpuluh-puluh tahun tidak diperbaiki. Entah kapan baru diperbaiki,” kata seorang warga Elar Selatan. Beberapa warga Elar Selatan, Matias Jehalu, Korinus, Siprianus Jehabu, yang ditemui Pos Kupang di Desa Panwaru, Kecamatan Elar Selatan, Minggu (1/6) siang, mengatakan, ruas jalan provinsi yang rusak itu pernah diaspal saat Gaspar Ekok menjabat Bupati Manggarai tahun 1989. Sejak saat itu hingga saat ini jalan tersebut tidak pernah diperbaiki lagi. Mereka mengatakan, dalam setiap pertemuan pada masa kepemimpinan Bupati Christian Rotok, dan sekarang Yoseph Towe, warga selalu mengusulkan perbaikan ruas jalan itu. Namun keduanya selalu menjawab bahwa ruas jalan itu statusnya jalan provinsi, bukan urusan pemerintah kabupaten.

### **3. Bidan Ningsi Takut Melintas. Air Laut Masuk ke Badan Jalan di Trans Utara Lintas Flores**

Pos Kupang: Selasa, 10 Juni 2014 (halaman 11)

Air laut di wilayah pantai utara Flores menggenangi badan jalan. Hal ini karena tembok penahan gelombang rubuh. Disaksikan Pos Kupang, pengendara sepeda motor dan mobil kewalahan saat menyebrangi jalan tersebut. Derasnya gelombang laut langsung menghantam badan jalan. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, dalam waktu dekat jembatan lintas utara di titik Waturia bisa putus. Kurnia Ningsi (29), seorang bidan di Puskesmas Magepanda, yang hendak ke Magepanda saat ditemui Senin (9/6) pagi, mengaku sangat ketakutan bila melewati jalan tersebut. Selain badan jalannya sudah penuh dengan air seperti banjir, amukan gelombang yang tidak berhenti membuat dirinya khawatir. Dia mengaku genangan air di badan jalan ini memang sering di saat cuaca laut lagi memburuk seperti saat ini. Namun menurutnya alasan utama terjadi seperti ini, karena tembok penahan gelombang di kawasan pesisir pantai utara semuanya sudah rubuh dan belum diperbaiki. Para pengguna jalan berharap Pemkab Sikka memperhatikan hal ini. Karena situasi jalan Trans Flores makin hari makin menakutkan dan tidak nyaman dilewati kalau laut lagi tak bersahabat seperti saat ini.

## AIR

### 1. Dua Sumber Air Jadi Rebutan

Timor Express: Rabu, 4 Juni 2014 (halaman 15)

Hingga saat ini krisis air minum bersih bagi masyarakat di wilayah Borong ibukota Kabupaten Manggarai Timur (Matim) masih berlangsung. Untuk bisa bertahan hidup, warga terpaksa mengonsumsi air dari dua kali yakni kali Wae Leku dan Wae Bobo. Dua kali itu menjadi rebutan antara manusia dan hewan perliharaan manusia seperti sapi, kambing, kerbau dan kuda, merebut dan mengonsumsi air dari dua kali itu dengan kondisi air yang seharusnya sangat tidak layak untuk konsumsi oleh manusia karena tidak *higienis*. Selain hewan dan manusia, dua kali tersebut dimanfaatkan oleh para pengemudi dan pengendara untuk mencuci kendaraannya. Jarak pemukiman warga dengan sumber air itu juga sangat jauh. Setiap hari kebutuhan air masyarakat semakin tinggi, apalagi masyarakat kecil tidak mampu membeli air tangki yang dijual keliling. Sementara, para pejabat di wilayah Matim dilayani oleh tangki milik Pemerintah Kabupaten Matim. Krisis air minum bersih dialami warga sejak enam tahun lalu sejalan dengan usia Kabupaten Matim. Sebelum Matim terbentuk jadi kabupaten otonom, warga Kota Borong seluruhnya tidak pernah mengalami krisis air karena warga terbantu dengan proyek air minum bersih yang dibangun pihak swasta atau misi seperti yayasan dari Pater Waser. Setelah fasilitas air minum itu diserahkan kepada Pemkab Matim, warga Kota Borong mengalami krisis air minum bersih. Janji pemerintah untuk mengatasi persoalan itu tidak terwujud. "Ada proyek perpipaan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi NTT tahun lalu, tapi hingga sekarang mubazir karena tidak dialiri air. Bahkan banyak pipa yang rusak akibat proyek pelebaran jalan dan juga karena ada pipa yang ditanam ke dalam tanah tidak sesuai petunjuk teknis atau tanam dengan kedalaman 5 cm. Janji Pemkab mau membuka kran air ke setiap rumah tidak terwujud. PDAM saja belum terbentuk," kata sejumlah warga Kota Borong, Agustinus Jemalut, Gabriel Marut, Hendrik Sanar dan Sipri Jemehot. Sementara Kepala Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyedia Air Minum (BLUD-SPAM) Provinsi NTT, Purnomo Dwi Aryanto yang ditemui di Kantor Bupati Matim menjelaskan, timnya sedang membentuk dan menyiapkan administrasi serta perangkat BLUD Matim. Perangkat yang dimaksud adalah kepala BLUD, kepala bagian teknik dan kepala bagian administrasi keuangan. Dia mengaku, meteran rumah yang saat ini sudah rusak akan diganti secara gratis ketika BLUD secara resmi sudah memiliki badan dan payung hukum. Purnomo berharap, jika lembaga itu telah terbentuk, semua program bisa berjalan dan masalah air minum bersih di Kota Borong secepatnya bisa diatasi.

## 2. Rp 4,5 M untuk Penambahan Debit Air

Pos Kupang: Selasa, 3 Juni 2014 (halaman 22)

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Pemkab Matim) mendapat alokasi dana senilai Rp 4,5 miliar untuk membangun fasilitas penambahan debit air guna memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Borong dan sekitarnya yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Matim, Yosep Marto, ST, mengemukakan hal itu ketika ditemui Pos Kupang di ruang kerja sekretaris PU Matim, Jumat (30/5) pagi. Marto mengatakan, penambahan debit air bersih yang dibiayai dana tersebut dilakukan dengan membangun fasilitas di sumber mata air baru, yaitu Wae Teka Nampo. Marto mengakui, keluhan masyarakat Kota Borong selama ini mengenai kekurangan air bersih adalah benar. Masalah yang dihadapi, jelasnya, terjadi peningkatan penduduk di Kota Borong. Dengan demikian, fasilitas air minum yang dibangun Pater Waser sudah tidak mencukupi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah. Tak terpenuhinya kebutuhan air minum bersih itu, selain karena perilaku sosial masyarakat yang selalu menyumbat air, juga banyaknya udara yang masuk dalam pipa air sehingga jalannya air sangat terhambat. Marto mengatakan, selama kurang lebih satu minggu air dari jaringan perpipaan di sebagian wilayah Kota Borong tidak keluar akibat perilaku sosial. "Sekarang kita sudah bangun pos jaga di mata air Wae Mao dan sudah menempatkan petugas jaga. Ke depan kita juga usahakan setiap mata air akan ditempatkan pos jaga," kata Marto. Marto mengatakan, sumber mata air yang melayani warga di wilayah Kecamatan Borong dan Kecamatan Rana Mese, yaitu Wae Kaco dan Wae Luju melayani wilayah Mbeling, Rehes, Pecek Kecamatan Rana Mese dengan wilayah Kembur, Kecamatan Borong. Sedangkan mata air dari Wae Mano, Wae Tewek dan penambahan mata air baru Wae Teka Nampo untuk melayani wilayah Lehong, Kembur, Peot wilayah Kota Borong, Kecamatan Borong. "Sekarang sudah tersedia meteran air sebanyak 1.170 unit. Meteran tersebut siap dipasang untuk warga Kota Borong. Biaya pemasangannya termasuk semua perlengkapannya Rp 1.200.000. Sekarang masih dalam penetapan harga satuan per unit meteran yang dipasang dan juga sosialisasi kepada masyarakat," kata Marto. Ia berharap seluruh masyarakat wilayah Kota Borong meliputi Kecamatan Borong dan Kecamatan Rana Mese bersabar karena pembangunan dan pemasangan meteran air masih dalam proses.

## 3. Baru 30 Persen Warga Nikmati Air PDAM

Pos Kupang: Sabtu, 7 Juni 2014 (halaman 19)

Hingga kini baru 30 persen warga Kabupaten Ende menikmati pelayanan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kelimutu. Ditargetkan pada tahun 2019 mendatang 90 persen warga Ende bisa menikmati air dari PDAM Ende. Direktur

utama PDAM Ende, Soedarsono mengatakan hal itu kepada Pos Kupang, Jumat (6/6). Soedarsono mengatakan, pelayanan PDAM Ende, selain di Kota Ende juga tersebar di wilayah kecamatan seperti Kecamatan Wolowaru, Nangapanda dan Maurole. Untuk Kota Ende dari jumlah penduduk sekitar 12 ribu lebih, baru 8.700 warga atau pelanggan. Alasannya, kata Soedarsono, keterbatasan yang dimiliki oleh PDAM Ende seperti kondisi jaringan yang pada umumnya masih menggunakan jaringan lama maupun keterbatasan kapasitas bak penampung atau resevoir. Selain itu terbatasnya sumber air baku, juga karena kurangnya dukungan dari warga sendiri sehubungan dengan rencana pengembangan jaringan air PDAM Ende. Untuk mengatasi permasalahan itu, jelas Soedarsono, tahun 2014, PDAM Ende berencana melakukan pengembangan yang diawali dengan studi review jaringan, terutama di dalam wilayah Kota Ende. "Dana untuk review jaringan diusahakan dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014 sekitar Rp 150.000.000 hingga Rp 200.000.000," kata Soedarsono.

#### **4. Warga Liliba Keluhkan Kinerja PDAM**

Victory News: Senin, 2 Juni 2014 (halaman 7)

Warga di kompleks Rumah Susun Sederhana (RSS) Liliba, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, mengeluhkan pelayanan air bersih dari pihak PDAM Kota Kupang. Untuk mencukupi kebutuhan air bersih mereka terpaksa membeli air dari tangki air. "Seminggu sekali air keluar, yaitu hari Kamis. Tapi keluarnya kecil saja. Apalagi keluarnya malam hari. Jadi ada yang dapat, ada yang tidak. Kalaupun dapat, airnya tidak cukup untuk pemakaian selama seminggu. Kita terpaksa beli dari mobil tangki," kata Ketua RT 15/RW 15 Kelurahan Liliba Anis D Sabon, kepada VN, Sabtu (31/5). Dia mengatakan, kondisi ini menyebabkan kebutuhan air bersih rumah tangga tidak tercukupi di wilayah ini. Sementara Atik, salah seorang ibu rumah tangga menambahkan, air PDAM hanya bisa digunakan selama tiga hingga empat hari. Selebihnya mereka terpaksa menggunakan air tangki yang dibeli seharga Rp 50.000 per tangki (5000 liter). Padahal mereka juga meragukan kualitas air tangki tersebut. Direktur PDAM Kabupaten Kupang Johannes Otoemoesoe mengatakan pelayanan air untuk RSS Liliba selama ini dijadwalkan seminggu sekali. Karena titiknya banyak, air mengalir selama 24 jam. Untuk mengefektifkan pelayanan, selanjutnya mereka menjadwalkan pelayanan 2 kali seminggu namun dengan waktu 12 jam sehari. "Kalau RSS Liliba jadwalnya hanya sekali seminggu. Karena titiknya banyak, air jalan selama 24 jam tetapi nanti saya koordinasi dengan teman-teman di lapangan supaya jam operasinya dikurangi menjadi 12 jam namun jadwal mengalirnya seminggu dua kali. Saya berharap upaya tersebut bisa mengatasi keluhan pelanggan," ujarnya.

## 5. Embung Ratusan Juta Mubazir

Timor Express: Senin, 2 Juni 2014 (halaman 13)

Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Pembkab TTS) untuk menanggulangi kekurangan air bersih pada musim kemarau di beberapa daerah yang kesulitan air bersih adalah membangun embung. Dengan tujuan, untuk menampung air, sehingga sumber-sumber air yang ada tetap hidup pada musim kemarau. Namun upaya tersebut dikhawatirkan tidak akan mencapai harapan, karena pembangunan embung di Desa Oebaki Kecamatan Noebaba tidak berfungsi sesuai harapan. Karena, sampai saat ini embung yang dikerjakan CV. Multi Sarana tahun 2013 dengan menelan dana yang bersumber dari DAU dan DAK senilai Rp 874.057.000 tampak kering. Demikian dikatakan warga Desa Oebaki, Maxi Ataupah didampingi Kornelis Isu ketika mengadukan persoalan itu kepada Timor Express di Soe, Sabtu (31/5). Maxi mengatakan, sebelumnya masyarakat setempat sangat bergembira dengan adanya pembangunan embung. Karena, selama ini masyarakat di desa tersebut selalu saja mengalami kekurangan air bersih di musim kemarau. Namun sayang, harapan masyarakat kebutuhan air pada musim kemarau akan tercukupi dengan adanya embung, tidak terwujud. "Awalnya survei di lokasi lain, tapi pelaksanaannya di lokasi lain. Selama ini kami ambil air di kali yang jaraknya kurang lebih 3-4 kilo dari pemukiman warga," ungkap Maxi. Sementara Kornelis Isu menambahkan, masyarakat awam merasa aneh melihat pembangunan embung yang ada. Pasalnya, sesuai pengamatan masyarakat awam, pada umumnya bentuk embung menyerupai tacu (kuali, red). Namun pembangunan embung yang ada berbentuk menyerupai periuk. Tidak hanya bentuknya yang aneh, namun embung tersebut dibangun di ketinggian, sehingga dinilai tidak mungkin air mengalir masuk ke embung tersebut. "Seharusnya kami sudah menikmati air di embung ini, pada musim kemarau 2014. Tapi sampai sekarang embung masih kering. Kalau hujan, air tertampung tapi itupun di dasar embung saja, sehingga dua atau tiga jam kemudian sudah kering," katanya. Terpisah, anggota DPRD terpilih periode 2014-2019 Roy Babis mengatakan, jika pembangunan embung tidak berfungsi sesuai harapan, tentu terdapat item-item pekerjaan yang diabaikan oleh kontraktor. Selain itu, tentu pekerjaan embung juga tidak sesuai dengan teknis pekerjaan embung. Untuk itu, kontraktor yang mengerjakan embung tersebut harus membenahi agar masyarakat bisa menikmati manfaat dari embung tersebut.

## 6. Pipa Air 2.000 Meter Hancur

Pos Kupang: Jumat, 13 Juni 2014 (halaman 2)

Warga Desa Camplong II dan Desa Tolnaku di Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, sudah dua bulan mengalami krisis air bersih. Hal ini karena proyek pekerjaan jalan poros tengah di wilayah tersebut menghancurkan jaringan pipa air bersih

sepanjang 2.000 meter. Kasus ini diungkapkan Kepala Dusun I Nunbe'at, Desa Tolnaku Ananias Mella, saat dihubungi, Rabu (11/6). "Warga dua desa, yaitu Tolnaku dan Camplong II sudah dua bulan tidak dapat air bersih. Jaringan pipa sepanjang dua kilometer hancur," jelas Mella. Penyebabnya, lanjut Mella, pihak kontraktor yang mengerjakan proyek jalan tersebut, menggali sampai putus jaringan pipa 6 dim yang melintasi dua desa tersebut. Penjelasan senada juga disampaikan beberapa warga lainnya, Yonatan Oematan, Matheos Bait, Ny. Nonia Tapatap-Manane, Aleks Babys dan Kornelis Bait. "Tiap hari kami harus sewa sepeda motor ojek untuk ambil air di sumber mata air Oel Ekam. Tarifnya, dua jerigen besar ukuran 40 liter atau 10 jerigen kecil, kami harus bayar ojek Rp 15.000 sampai Rp 20.000," jelas Ny. Nonia Tapatap-Manane. Yonatan Oematan dan Matheos Bait, mengaku kesal terhadap Pemkab Kupang dan kontraktor. "Kami mau bayar air atau mau beli beras? Kalau begini terus, kami akan gelas demonstrasi ke Kantor Bupati," ancam Oematan dan Bait, didukung warga lain. Pantauan Pos Kupang, ada 11 titik pipa yang dibongkar kontraktor dan para buruh PT Utama Mitra Nusantara dan PT Karya Buana. Batangan pipa yang dibongkar, dibiarkan tergeletak di pinggir jalan.

## 7. Warga Leowalu Konsumsi Air Kali

Timor Express: Sabtu, 14 Juni 2014 (halaman 13)

Ratusan kepala keluarga yang tinggal di Dusun Berahasak, Dusun Airawan Teten dan Dusun Lonkulo Desa Leowalu Kecamatan Lamaknen masih mengandalkan aliran kali Lia Kai untuk memenuhi kebutuhan minum, cuci serta mandi. Warga yang tinggal di pesisir kali Lia Kai mengaku mengalami kesulitan air bersih saat musim hujan tiba, terutama pada saat kali Lia Kai meluap. "Selama ini kami terpaksa buat semacam sumur kecil di pinggir kali lalu timba airnya untuk makan dan minum. Jadi, kalau musim hujan kami terpaksa tunggu banjir turun dulu baru buat lagi sumur kecil air minum walaupun airnya masih keruh, kami terpaksa ambil airnya karena tidak ada pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan minum keluarga," ungkap Ketua BPD Leowalu, Benuard Laka saat ditemui Timor Express di Leowalu selama ini. Menurut Benuard, beberapa tahun silam, masyarakat di tiga dusun tersebut sempat menikmati air bersih yang diambil dari salah satu sumber mata air di wilayah Kecamatan Lamaknen. "Kami minta Pemerintah Kabupaten Belu untuk tidak lagi tarik pipa air lagi, tapi cukup bangun sumur secukupnya untuk kami masyarakat di tiga dusun ini biar tidak mengalami kesulitan air bersih terutama pada saat banjir turun," katanya. Masalah kesulitan air bersih pasca rusaknya jaringan perpipaan menurut Benuard, sudah berulang kali disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Belu, belum mendapat tanggapan serius. Ia mengaku, sudah kehilangan kesabaran untuk menyuarkan kesulitan warga kepada Pemerintah Kabupaten Belu. "Kami sudah jenuh dan bosan sampaikan masalah kesulitan air bersih warga Desa Leowalu

ke pemerintah kabupaten. Jadi kami tunggu saja kapan pemerintah tergerak hati untuk membantu mengatasi masalah kami,” kata Benuard Laka.

## Tentang Penerbit

Penerbitan NTT Research Focus adalah bagian dari pengembangan NTT Studies oleh IRGSC, sebuah think tank yang berbasis di Kupang, NTT.

Koordinator pelaksana : Inriyani Takesan  
Penanggung Jawab : Dominggus Elcid Li, PhD  
Editor : Dr. Jonatan A. Lassa  
Asisten pelaksana : Nike Frans, Randy Banunaek  
Reviewer : John Talan